



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IQBAL FIKRI
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK : 194129

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.840.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/103 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/73 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.380.000.000
3. Bangunan Seluas 23.54 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 367.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 117.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 113.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 497.462.116

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.817.962.116

III. HUTANG Rp. 610.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.207.962.116

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **OGGY ACHMAD KOSASIH**
2. Jabatan : **DIREKTUR PELAKSANA**
3. NHK : **194466**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 6.293.554.395**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m²/300 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.245.666.000
2. Bangunan Seluas 38.2 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 720.575.205
3. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m²/100 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000
4. Bangunan Seluas 24 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.038.656.595
5. Bangunan Seluas 24 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.038.656.595

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 1.172.000.000**

1. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, MINI COOPER SEDAN Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 407.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 359.947.320****D. SURAT BERTHARGA****Rp. 3.501.224.189****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 17.390.466.026****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 28.717.191.930**



III. HUTANG

Rp. 240.576.194

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 28.476.615.736

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Juli 2020/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : DIREKTUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WING ANTARIKSA**
2. Jabatan : **DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA**
3. NHK : **224733**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 400.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 247.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.300.798.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 3.749.000.000

Sub Total Rp. 11.446.898.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 11.446.898.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **Lengkap** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Oktober 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.